

Permintaan Proposal (Konsultan)
Request for Proposal (Consultancy)

Judul	: Penyediaan jasa pendampingan teknis (Technical Assistance) Operasionalisasi Kerangka Kerja KIA bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong
Bulan	: Agustus 2026 – Maret 2027
Periode Pekerjaan	: 8 bulan
Lokasi	: Palu (Ibu Kota) dan Parigi Moutong, Sulawesi Tengah

Persyaratan Umum / Latar Belakang

Indonesia telah menetapkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Anak merupakan indikator pembangunan nasional yang harus dicapai melalui penguatan sistem kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, tata kelola yang efektif, serta kolaborasi lintas sektor. Upaya ini juga merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya target penurunan Angka Kematian Ibu menjadi kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030.

Meskipun berbagai kemajuan telah dicapai dalam dua dekade terakhir, penurunan kematian ibu di Indonesia masih berlangsung lebih lambat dibandingkan target yang telah ditetapkan. Tantangan utama tidak hanya berasal dari aspek pelayanan kesehatan, tetapi juga dipengaruhi oleh ketimpangan kapasitas sistem kesehatan antar wilayah, keterbatasan pembiayaan, lemahnya tata kelola program, belum optimalnya koordinasi lintas sektor, serta belum terintegrasinya perencanaan dan penganggaran kesehatan ibu dan anak (KIA) ke dalam sistem pembangunan daerah. Disparitas kapasitas fiskal dan kesiapan layanan kesehatan antar daerah menyebabkan kebutuhan intervensi menjadi sangat kontekstual sehingga memerlukan pendekatan yang berbeda sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) telah menyusun Kerangka Kerja Nasional Penurunan Kematian Ibu dan Anak Tahun 2026-2030 sebagai pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penurunan kematian ibu dan anak. Kerangka kerja tersebut menekankan pentingnya penguatan tata kelola, perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, penguatan sistem kesehatan, penggunaan data untuk pengambilan keputusan, penguatan monitoring dan evaluasi, serta kolaborasi lintas sektor sebagai prasyarat keberhasilan implementasi di tingkat daerah. Kerangka kerja ini juga memperkenalkan pendekatan berbasis fase transisi kematian ibu, sehingga strategi yang diterapkan dapat disesuaikan dengan kapasitas sistem kesehatan dan beban masalah di masing-masing daerah.

Sebagai bagian dari komitmennya untuk mendukung pemerintah Indonesia dalam meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi yang berkualitas, Yayasan IPAS Indonesia bekerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola KIA, meningkatkan kualitas layanan kesehatan reproduksi, memperkuat sistem rujukan, serta mendukung implementasi kebijakan nasional di tingkat daerah.

Pada tahun 2026-2027, IPAS Indonesia akan mendukung Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam mengoperasionalkan Kerangka Kerja Nasional Penurunan Kematian Ibu dan Anak melalui penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah Kerangka Kerja Nasional Penurunan Kematian Ibu dan Anak (Renaksi Daerah KKNPKIA), penguatan koordinasi lintas sektor, integrasi ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah, serta penguatan mekanisme monitoring dan pembelajaran.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, Yayasan IPAS Indonesia mengundang organisasi berlokasi di Sulawesi Tengah yang memiliki pengalaman dalam tata kelola kesehatan, sistem kesehatan, perencanaan pembangunan daerah, penganggaran pemerintah daerah, dan KIA untuk menyampaikan proposal teknis dan finansial dalam rangka penyediaan jasa pendampingan teknis (Technical Assistance) bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong selama periode Agustus 2026 hingga Maret 2027.

Tujuan Pengadaan Jasa Konsultansi

Tujuan Umum

Menyediakan pendampingan teknis (technical assistance) kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam mengoperasionalkan Kerangka Kerja Nasional Penurunan Kematian Ibu dan Anak melalui penguatan tata kelola, penyusunan dan implementasi Renaksi Daerah KKNPKIA, integrasi ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah terutama untuk tahun 2028, serta penguatan kapasitas pemerintah daerah untuk mendukung percepatan penurunan angka kematian ibu secara berkelanjutan.

Tujuan Khusus

Penyedia jasa diharapkan mendukung pemerintah daerah di provinsi Sulawesi Tengah dan kabupaten Parigi Moutong untuk:

1. **Memperkuat tata kelola KIA** melalui penguatan koordinasi lintas sektor, pembagian peran yang jelas antar pemangku kepentingan, serta mekanisme koordinasi dan akuntabilitas dalam implementasi Kerangka Kerja Nasional Penurunan Kematian Ibu dan Anak.
2. **Mendukung penyusunan, penyempurnaan, dan operasionalisasi Renaksi Daerah KKNPKIA** yang selaras dengan Kerangka Kerja Nasional Penurunan Kematian Ibu dan Anak, kebijakan kesehatan reproduksi, kebijakan Kementerian Kesehatan, serta kebijakan pembangunan daerah.
3. **Mendukung integrasi prioritas Renaksi Daerah KKNPKIA ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah**, termasuk RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat

Daerah, Renja Perangkat Daerah, KUA-PPAS, RKA, DPA, dan dokumen perencanaan daerah lainnya sesuai kebutuhan dan tahapan siklus pembangunan daerah – terutama untuk tahun 2028.

4. **Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah** dalam perencanaan, penganggaran, implementasi, monitoring, dan evaluasi program KIA melalui asistensi teknis.
5. **Mendukung penggunaan data dan bukti dalam pengambilan keputusan** melalui analisis situasi, identifikasi prioritas daerah, monitoring implementasi, serta penyusunan rekomendasi perbaikan program.
6. **Mendokumentasikan praktik baik, pembelajaran, dan rekomendasi kebijakan** yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, BAPPENAS, Kementerian Dalam Negeri, serta Yayasan IPAS Indonesia sebagai dasar replikasi dan pengembangan implementasi di daerah lain.

Hasil yang Diharapkan

Melalui pendampingan teknis ini diharapkan tercapai:

- Tersusunnya dan/atau penguatan Renaksi Daerah KKNPKIA di Provinsi Sulteng dan Kabupaten Parigi Moutong yang selaras dengan Kerangka Kerja Nasional Penurunan Kematian Ibu dan Anak
- Terintegrasinya prioritas KIA ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah.
- Penguatan koordinasi lintas sektor antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, perangkat daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan pemangku kepentingan lainnya.
- Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dalam mengimplementasikan, memantau, dan mengevaluasi program KIA.
- Tersedianya produk pengetahuan dan rekomendasi kebijakan sebagai dasar penguatan implementasi dan pembelajaran program.

Durasi dan Ruang Lingkup Pekerjaan

Penugasan ini akan dilaksanakan selama 8 (delapan) bulan, yaitu mulai Agustus 2026 sampai dengan Maret 2027, dengan lokasi utama di Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Parigi Moutong.

Penyedia jasa diharapkan menyediakan tim pendamping yang mampu memberikan dukungan teknis secara berkelanjutan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten melalui kombinasi kegiatan seperti analisis data dan kebijakan, penyusunan dokumen teknis seperti Renaksi dan dokumen administrasi publik terkait perencanaan dan penganggaran daerah, serta fasilitasi dalam pertemuan ataupun diskusi.

Perjalanan dinas tenaga ahli, termasuk perjalanan antara Palu dan Kabupaten Parigi Moutong sesuai kebutuhan pendampingan, menjadi bagian dari tanggung jawab penyedia jasa dan harus diperhitungkan dalam proposal finansial.

Penyedia jasa diharapkan menggunakan pendekatan partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, Bappeda, Dinas Kesehatan, rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi profesi, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta mitra pembangunan sesuai kebutuhan implementasi.

Ruang lingkup pekerjaan meliputi namun tidak terbatas pada kegiatan berikut.

A. Inisiasi dan Persiapan Pendampingan (Agustus-September 2026)

Penyedia jasa akan bertanggung jawab dalam persiapan pendampingan pemerintah provinsi dan kabupaten:

- Mengikuti *recorded* refreshment training dan briefing kepada Pendamping oleh BAPPENAS
- Menyusun metodologi pelaksanaan pendampingan dan koordinasi dengan pemerintah daerah.
- Mendukung penjelasan persiapan dan fasilitasi *refreshment training* Pemerintah Daerah (jika diperlukan)
- Memberikan penjelasan tentang Buku Saku dan Juknis pendampingan kota/kabupaten serta berbagai instrumen dalam penyusunan Renaksi Daerah KKNPKIA yang disiapkan oleh BAPPENAS
- Melakukan review terhadap Kerangka Kerja Nasional Penurunan Kematian Ibu dan Anak, Pedoman PPT-Kespro, Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri, kebijakan Kementerian Kesehatan, serta dokumen daerah yang relevan.
- Berkoordinasi dan melaksanakan diskusi teknis dengan IPAS dan Tim Bappenas, terkait dokumen KKNPKIA, menyusun metodologi pendampingan serta memahami Buku Saku dan Juknis Pendampingan

B. Analisis Situasi dan Penguatan Tata Kelola (September-Oktober 2026)

Penyedia jasa akan memberikan asistensi teknis kepada Bappeda dan Dinkes di provinsi dan kabupaten untuk:

- Memfasilitasi pertemuan analisis situasi KIA dan Kesehatan Reproduksi di Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Parigi Moutong.
- Mendukung pemerintah mengidentifikasi tantangan tata kelola, koordinasi, pembiayaan, dan implementasi program.
- Mendukung identifikasi prioritas intervensi berdasarkan Kerangka Kerja Nasional untuk setiap OPD terkait di Sulawesi Tengah dan kabupaten Parigi Moutong.
- Memfasilitasi Bappeda dan Dinkes dalam kegiatan koordinasi untuk mendapatkan informasi dari lintas sektor dan dukungan dari Kepala Daerah

C. Pendampingan Teknis Review RAB 2027 dan Penyusunan Renaksi secara Luring dan Daring (September-November 2026)

Penyedia jasa akan:

- Mendukung Pemda menyiapkan review perencanaan dan penganggaran 2027
- Memfasilitasi pertemuan penyusunan hingga penyempurnaan Draft Renaksi Daerah KKNPKIA
- Mendukung Pemda memastikan Renaksi Daerah KKNPKIA dengan Kerangka Kerja Nasional dan kebijakan nasional terkait serta tersusun dengan keterlibatan lintas sektor
- Mendukung penyusunan target, indikator, strategi implementasi, dan mekanisme monitoring.
- Memfasilitasi proses konsultasi dan finalisasi dokumen bersama lintas sektor, Kemendagri, Kemenkes, dan BAPPENAS
- Memastikan Pemda mengikuti kegiatan *coaching* dengan BAPPENAS, Kemendagri, dan Kemenkes untuk review dan penyempurnaan Renaksi serta pendampingan tematik sesuai kebutuhan di Daerah.

D. Penyusunan Rencana Integrasi Renaksi Daerah KKNPKIA ke Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Desember 2026 - Maret 2027)

Penyedia jasa akan mendampingi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan untuk mengintegrasikan prioritas KIA ke dalam beberapa dokumen yang meliputi:

- RKPD (prioritas untuk 2028)
- Rencana Belanja Daerah 2027
- Rencana Kerja Perangkat Daerah (prioritas untuk 2028)
- Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
- Rencana Kerja dan Anggaran
- Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pendampingan dapat meliputi:

- pemetaan program;
- penyelarasan indikator;
- identifikasi kebutuhan pembiayaan;
- analisis fiscal gap dan identifikasi potensi sumber-sumber pembiayaan lainnyaarekomendasi pembiayaan;
- penyusunan matriks integrasi.

E. Monitoring, Evaluasi, dan Pembelajaran

Penyedia jasa akan berkoordinasi dengan BAPPENAS, Kemendagri, dan Kemenkes untuk:

- Melakukan monitoring progress finalisasi dan pengesahan Renaksi Daerah KKNPKIA
- Melakukan monitoring progress adopsi Renaksi ke dalam RKP dan Renja 2028
- Mengidentifikasi bottleneck implementasi.
- Memberikan rekomendasi tindak lanjut.
- Mengidentifikasi lesson learned dan dokumentasi praktik baik.
- Mendukung evaluasi akhir piloting.

Luaran (Deliverables)

No	Deliverable	Waktu Penyerahan	Termin Pembayaran
1	Penandatanganan kontrak kerja dengan Yayasan IPAS	Bulan 1 (Agustus 2026)	20%
2	Laporan review RAB 2027 Pemerintah Provinsi Sulteng dan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong	Bulan 2 (September 2026)	20%
3	Dokumen draft Renaksi Daerah KKNPKIA yang telah disusun beserta notulensi/berita acara konsultasi pemangku kepentingan	Bulan 3 (November 2026)	10%
4	Rekomendasi rencana integrasi Renaksi Daerah KKNPKIA ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah Tahun 2028	Bulan 4-5 (Desember 2026)	10%
5	Dokumentasi kegiatan bersama pendamping dari Nasional dan Provinsi (coaching, zoom meeting) dan tindak lanjut	Bulan 2-5 (dikumpulkan di Desember 2026)	10%
7	Minimal 2 produk pengetahuan, seperti policy brief, technical brief, lesson learned, atau best practice	Bulan 7 (Februari 2027)	10%
8	Laporan akhir yang memuat capaian, analisis hasil pendampingan, rekomendasi kebijakan, strategi keberlanjutan, serta seluruh dokumen pendukung	Bulan 8 (Maret 2027)	20%

Keluaran Pendukung (Supporting Output)

Selain deliverables utama di atas, penyedia jasa juga bertanggung jawab untuk menyerahkan:

- Materi presentasi dan bahan workshop.
- Notulen atau ringkasan hasil pertemuan koordinasi.
- Daftar hadir kegiatan yang difasilitasi.

- Dokumentasi kegiatan (foto dan materi presentasi).
- Softcopy seluruh dokumen dalam format yang dapat diedit (Microsoft Word, Excel, PowerPoint) dan format PDF.

Keahlian dan Kualifikasi Penyedia Jasa

Pengadaan ini terbuka bagi:

- Tim konsultan;
- Perguruan tinggi;
- Lembaga penelitian; atau
- Organisasi lain yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang relevan.

Penyedia jasa dapat mengajukan proposal secara individu maupun sebagai tim. Dalam hal proposal diajukan oleh tim, salah satu anggota harus ditunjuk sebagai Team Leader yang bertanggung jawab terhadap koordinasi teknis, komunikasi dengan Yayasan IPAS Indonesia, dan penyampaian seluruh deliverables.

Tim Konsultan

Penyedia jasa diharapkan mengusulkan minimal 2 personel kunci.

1. Team Leader

Preferensi Kualifikasi

- Pendidikan minimal S2 pada bidang:
 - Kebijakan Publik
 - Administrasi Publik
 - Perencanaan Pembangunan
 - atau bidang lain yang relevan.
- Pengalaman profesional minimal 8 tahun.

Pengalaman yang diutamakan

- Tata kelola kesehatan.
- Perencanaan pembangunan daerah.
- Penganggaran pemerintah daerah.
- Pendampingan pemerintah provinsi atau kabupaten.
- Memimpin technical assistance.

Tanggung jawab

- Memimpin keseluruhan penugasan.
- Memfasilitasi pertemuan penyusunan dan finalisasi Renaksi Daerah KKNPKIA
- Mendukung integrasi Renaksi Daerah KKNPKIA ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
- Menjamin kualitas seluruh deliverables.

- Menjadi liaison dengan IPAS Indonesia dan pemerintah daerah.
- Memberikan supervisi kepada anggota tim.

2. Public Health Officer

Preferensi Kualifikasi

- Pendidikan S1 di bidang kesehatan masyarakat, kedokteran, atau bidang terkait.
- Pengalaman kerja minimal 5 tahun.

Pengalaman kerja/akademik yang diutamakan

- Kesehatan Ibu dan Anak.
- Kesehatan reproduksi.
- Pengembangan kebijakan atau pedoman teknis.
- Mampu melakukan analisis data kuantitatif dan kualitatif

Tanggung jawab

- Memberikan masukan teknis terkait substansi program kesehatan masyarakat
- Mendukung persiapan dan analisis data untuk penyusunan Renaksi Daerah KKNPKIA
- Mengikuti semua kegiatan coaching clinic mendampingi Pemda
- Melakukan review substansi seluruh dokumen teknis bersama Pemda
- Mendukung koordinasi lintas sektor dalam keseluruhan kegiatan

Personel Pendukung (Opsional)

Penyedia jasa dapat mengusulkan personel pendukung lainnya apabila dipandang diperlukan, seperti:

- Monitoring and Evaluation Specialist;
- Finance and Administrative Support.

Seluruh biaya personel tambahan menjadi bagian dari proposal finansial yang diajukan oleh penyedia jasa.

Kompetensi Umum

Seluruh personel yang diusulkan diharapkan memiliki:

- Berlokasi di Palu/Parigi Moutong
- Kemampuan komunikasi dan fasilitasi yang sangat baik.
- Kemampuan bekerja dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- Kemampuan menyusun laporan teknis berkualitas tinggi.
- Kemampuan bekerja secara kolaboratif dalam tim multidisiplin.
- Bersedia melakukan perjalanan ke Kabupaten Parigi Moutong sesuai kebutuhan penugasan.

Pengiriman Dokumen Proposal

Penyedia jasa yang berminat diminta menyampaikan proposal teknis dan proposal finansial dalam bahasa Indonesia melalui surat elektronik (email).

Proposal dikirimkan kepada Yayasan IPAS Indonesia melalui alamat email: indonesiaprocurement@ipas.org dengan tembusan (cc): hutanamont@ipas.org

paling lambat pada Senin, 10 Agustus 2026, pukul 17.00 WIB

Subjek email ditulis sebagai berikut: *RFP Pendampingan Teknis Tata Kelola, Perencanaan dan Penganggaran KIA – Nama Organisasi Penyedia Jasa*

Dokumen Proposal

Proposal yang disampaikan sekurang-kurangnya terdiri atas:

A. Proposal Teknis

Proposal teknis memuat:

- Curriculum Vitae (CV) seluruh personel kunci yang diusulkan.
- Komposisi tim beserta pembagian tugas.
- Pengalaman relevan yang menunjukkan kemampuan penyedia dalam melaksanakan pekerjaan serupa.
- Dokumen legalitas organisasi

B. Proposal Finansial

Proposal finansial memuat:

- Rincian biaya personel berdasarkan posisi dan tingkat upaya (level of effort).
- Estimasi rincian biaya perjalanan interlocal antara Palu ke Parigi Moutong untuk tim konsultan dan Pemda (e.g., 1 orang dari BAPPEDA provinsi, 1 orang Dinkes provinsi atau 1 orang BAPPEDA kabupaten Parigi Moutong dan 1 orang Dinkes kabupaten Parigi Moutong)

Catatan:

- a. Biaya kegiatan akan ditetapkan oleh Yayasan IPAS Indonesia berdasarkan konsultasi dengan BAPPENAS. Nominal ini akan menjadi bagian dalam perjanjian kerja sama dengan organisasi terpilih.
- b. Seluruh biaya harus disajikan dalam mata uang **Rupiah (IDR)** dan telah memperhitungkan seluruh pajak serta biaya lain yang diperlukan untuk menghasilkan seluruh deliverables sesuai ruang lingkup pekerjaan tim.

Proses Evaluasi

Proposal akan dievaluasi berdasarkan kesesuaian terhadap pengalaman penyedia jasa dan kompetensi personel yang diusulkan (80%), serta kewajaran biaya (20%).

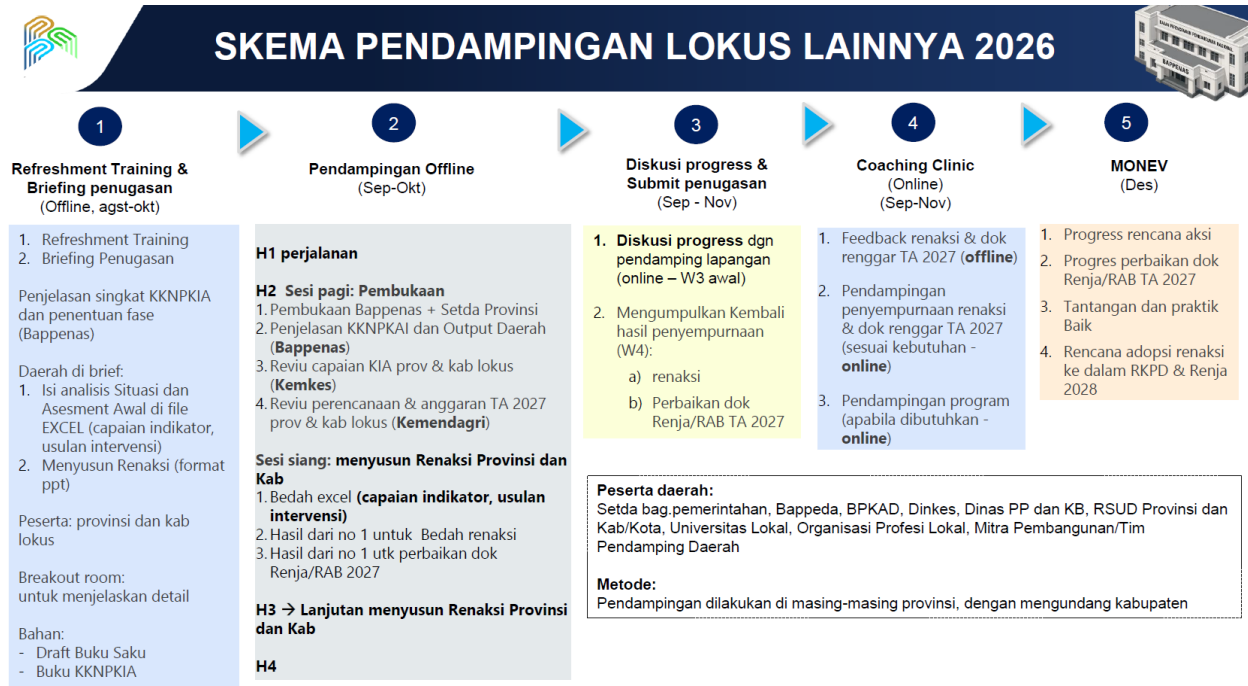
Yayasan IPAS Indonesia berhak meminta klarifikasi, presentasi, atau wawancara kepada penyedia jasa yang masuk dalam daftar pendek (shortlist) sebagai bagian dari proses evaluasi proposal.

Hanya penyedia jasa yang memenuhi persyaratan dan lolos menjadi preferensi utama yang akan dihubungi lebih lanjut oleh Yayasan IPAS Indonesia.

Lampiran 1. Estimasi Timeline Kerja dan Deliverables

Timeline di bawah ini merupakan rencana indikatif yang menjadi acuan pelaksanaan. Penyedia jasa diharapkan mengusulkan rencana implementasi yang sesuai timeline terlampir dan paling efektif untuk mencapai seluruh deliverables diantara Agustus 2026-Februari 2027 sesuai Lingkup Kerja RFP ini.

Penyesuaian terhadap jadwal pelaksanaan dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara BAPPENAS, Kementerian Kesehatan, Yayasan IPAS Indonesia dan penyedia jasa tanpa mengurangi ruang lingkup pekerjaan dan target hasil yang telah ditetapkan.



Pasca Desember: Melanjutkan MONEV, penyusunan 2 dokumen pengetahuan, dan penyerahan laporan final konsultan.